

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XXVII. INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan/ sasaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya.

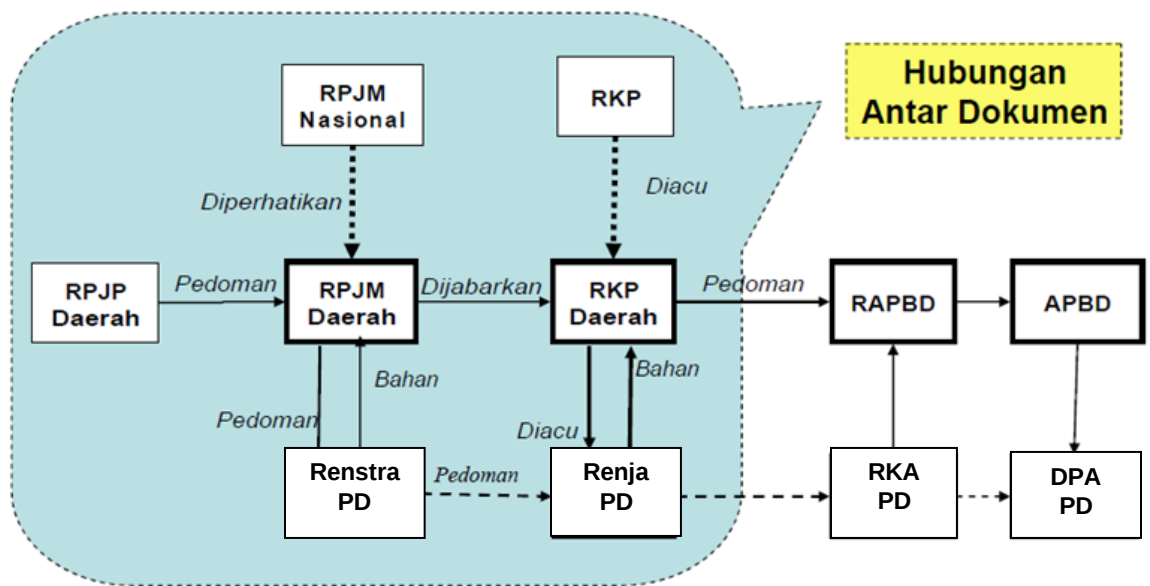


Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 memuat indikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (PD),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421));
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian Penghargaan dan / atau insentif inovasi

daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai arah dan acuan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran di Inspektorat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah, Analisa kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja, dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut input, output, outcomes.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan. Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai awal pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat diketahui.

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 15.324.878.703,- dan realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 13.947.673.121,-** dengan capaian **91,01%**. Jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja sebesar Rp. 13.947.673.121,- atau 91,01% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.324.878.703, sehingga tahun 2024 terdapat **efisiensi anggaran** sebesar Rp. 1.377.205.582,- atau **8,99%**. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100%
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan		5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	83%
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	1680 orang- bulan		560 orang - bulan	560 orang- bulan	100	826 Orang- bulan	1386 orang- bulan	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	39 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	62%
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	67%
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapnnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	1 Paket	50%
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150 Orang		22 Orang	22 Orang	100	125 Orang	147 Orang	98%
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		78 Orang	78 Orang	100	65 Orang	143 Orang	48%
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	133%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 Paket		7 Paket	7 Paket	100	7 Paket	14 Paket	58%
6010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket		8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	16 Paket	267%
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	67%
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 Laporan		110 Laporan	135 Laporan	122,73	50 Laporan	185 Laporan	73%
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	14 unit		4 unit	4 unit	100	96 unit	107 unit	764%
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 unit		25 unit	25 unit	100	88 unit	113 unit	491%
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	18 unit		11 unit	11 unit	100	8 unit	19 unit	106%
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	66,67
6010120803	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	133,33
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 Unit		15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	30 Unit	67%
6010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	150 Unit		50 Unit	50 Unit	100	10 Unit	60 Unit	40%
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit		50 Unit	50 Unit	100	54 Unit	104 Unit	69%
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	67%
60102	PROGRAM PENYELANGGARAA N PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	92%		100%	100%	100	90%	90,00%	97,83%
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	3 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	16 Laporan	533%
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	36 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	16 Laporan	44%
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	165 Laporan		57 Laporan	57 Laporan	100	57 Laporan	114 Laporan	69%
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	348 Laporan		116 Laporan	116 Laporan	100	116 Laporan	232 Laporan	67%
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	48 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	100	8 Laporan	24 Laporan	50%
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepaka tan		1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	100	0 Kesepak atan	1 Kesepakata n	100%
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen		4 Dokume n	4 Dokume n	100	4 Dokume n	8 Dokumen	67%
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%		100%	100%	100	100%	100,00%	100%
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	67%
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100	35 Laporan	55 Laporan	183%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	56%		52%	54,55%	104,90	56,00%	56,00%	100,00%
6010301	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%		0%	0%	0	0%	0,00%	0%
6010301	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%		100%	100%	100	100%	100,00%	100%
6010320201	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	165 perangkat daerah		57 perangkat daerah	57 perangkat daerah	100	57 perangkat daerah	114 perangkat daerah	69%
6010320202	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36 kegiatan		12 kegiatan	12 kegiatan	100	15 kegiatan	27 kegiatan	75%
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	6 perangkat daerah		4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100	4 perangkat daerah	8 perangkat daerah	133%

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2024 belum sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, karena pada tahun 2024 ini merupakan awal tahun pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya, maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat berupa :

1. Capaian kinerja program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A
2. Capaian Kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan capaian 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 12. Pengadaan Mebel
 13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 20. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 21. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 22. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 23. Reviu Laporan Kinerja
 24. Reviu Laporan Keuangan
 25. Pengawasan Desa
 26. Kerjasama Pengawasan Internal
 27. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 28. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
 29. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 30. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 31. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 32. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
3. Capaian sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Capaian sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan : Nihil

Atas evaluasi diatas, dilakukan analisis faktor penghambat/ pendorong dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan dalam pencapaian kinerja Renstra 2024-2026, sebagaimana pada tabel 2.1A berikut :

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
I.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	97,83%	90,00%	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan, Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai SOP diberikan batas waktu sekitar 3 bulan setelah LHP terbit. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun sehingga tidak lanjut melewati tahun berikutnya. Hal ini yang menjadi salahsatu pertimbangan target yang ditentukan tidak 100%.	Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan baik melalui surat, telepon/ datang langsung/Stressing kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data TLHP BPK dan APIP Kabupaten Pasuruan
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah disusun, tersedianya SDM yang kompeten	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	533,33%	533,33%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah disusun, tersedianya SDM yang kompeten	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44,44%	44,44%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah disusun, kurangnya jumlah Auditor sehingga Obyek Pemeriksaan terbatas.	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
c	Reviu Laporan Kinerja	69,09%	69,09%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah disusun, kurangnya jumlah Auditor sehingga Obyek Pemeriksaan terbatas.	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
d	Reviu Laporan Keuangan	66,67%	66,67%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan

				disusun, kurangnya jumlah Auditor sehingga Obyek Pemeriksaan terbatas.	
No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
e	Pengawasan Desa	66,67%	66,67%	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja dan renaksi yang telah disusun, kurangnya jumlah Auditor sehingga Obyek Pemeriksaan terbatas.	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
f	Kerjasama Pengawasan Internal	66,67%	66,67%	Kesepakatan Saber Pungli dengan Polres Kota Pasuruan sudah terlaksana menjadi 1 Kesepakatan dengan Polres Kabupaten Pasuruan	Selalu berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli dan UPP serta melaksanakan kegiatan rutin sosialisasi Saber Pungli di wilayah Kabupaten Pasuruan
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	66,67%	66,67%	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan	Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan baik melalui surat, telepon/ datang langsung/Stressing kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data TLHP BPK dan APIP Kabupaten Pasuruan, meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%	100,00%	Segera menangani/ melakukan pemeriksaan atas Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang masuk	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	66,67%	66,67%	Segera menangani/ melakukan tindak penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Tim TPKD (BPKPD Bidang Aset, BKPSDM, Bagian Hukum dan Inspektorat) dalam penyelesaian masalah

b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	183,33%	183,33%	Bertambahnya Pengaduan Masyarakat yang diterima, segera menangani/ melakukan pemeriksaan atas Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang masuk	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melaksanakan sosialisasi Aplikasi SEPAKAT, Kegiatan Satu Jam Bersama Desa, Coaching Clinic
No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
II.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100,00%	100,00%	Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin, tersedianya SDM yang kompeten, Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah, Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah.	Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak-pihak terkait seperti BPKP Provinsi Jawa Timur, BPK, KPK.
1.	Pendampingan dan Asistensi	100,00%	100,00%	Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin, tersedianya SDM yang kompeten	Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak-pihak terkait seperti BPKP Provinsi Jawa Timur, BPK, KPK.
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69,09%	69,09%	Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin terhadap Perangkat Daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP dan SPIP, tersedianya SDM yang kompeten	Melaksanakan secara rutin evaluasi,pendampingan asistensi dalam pelaksanaan penilaian SAKIP, SAKIP RB, SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP, Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak-pihak terkait seperti BPKP Provinsi Jawa Timur, Kemenpan RB, melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi, SPI, UPG, Benturan Kepentingan dan Nota Kesepahaman APIP/APH.
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	66,67%	66,67%	Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin terhadap Perangkat Daerah untuk memenuhi indikator elemen MCP KPK	Melaksanakan rapat setiap bulan dengan dipimpin oleh Bapak Sekretariat Daerah yang diikuti oleh Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan indikator MCP KPK, menjalin koordinasi dengan KPK selaku verifikator.

c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100,00%	100,00%	Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin kepada Perangkat Daerah, tersedianya SDM yang kompeten	Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penilaian ZI
---	--	---------	---------	---	---

Sesuai dengan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran, berarti secara kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan **baik** dan termasuk dalam kategori efisiensi **“Sangat Efisiensi”**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis dan capaian anggaran, sebagai berikut :

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
dalam mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (5/8x100)	Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan :									
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,244)	100 (102,98)					
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,54	98,45					
Sasaran :									
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,000)	100 (99,67)	3.042.378.820	2.597.164.273	85,37	117,13%	Sangat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	84,60 (A)	98,89	12.282.499.883	11.350.508.848	92,41	107,01%	Efisiensi

Kategori Efisiensi sebagai berikut :

No.	Interval Nilai	Tingkat Efisiensi
1	<90%	Tidak Efisiensi
2	90% - 100%	Cukup Efisiensi
3	100 – 110%	Efisiensi
4	>110 %	Sangat Efisiensi

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan tugas penjaminan mutu (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), sehingga secara tugs pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan pelayanan yang bersifat konsultatif/*consulting* kepada Perangkat Daerah lain.

Seluruh program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis , dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maupun Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Gambaran tentang capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IKU Renstra 2024-2026											
a.	Nilai Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1 /level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	IKK	Level 3 (3.150)	Level 3 (3.155)	Level 3 (3.250)	Level 3 (3.255)	Level 3 (3.244)	n/a	Level 3 (3.250)	Level 3 (3.255)	Target Tahun 2024 dan 2025 pada Renstra Tahun 2024-2026 sudah tidak relevan, sehingga targetnya dirubah menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya. Untuk target 2026 dan 2027 menyesuaikan draft Renstra Tahun 2025-2029
b.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			16,80	16,85	16,90	17,14	16,54	n/a	16,90	17,14	Target pada Renstra Tahun 2024-2026 masih relevan, untuk target 2027 menyesuaikan draft Renstra Tahun 2025-2029
c	Nilai Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (level 1 /level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	IKK	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3 (3.03)	Level 3 (3.04)	Level 3 (3.00)	n/a	Level 3 (3.03)	Level 3 (3.04)	Target pada Renstra Tahun 2024-2026 masih relevan
d	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			85,55 (A)	85,56 (A)	84,64 (A)	84,66 (A)	84,60 (A)	n/a	84,64 (A)	84,66 (A)	Target Tahun 2026 dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2024 dan menyesuaikan Rankhir Renstra Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sudah mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam IKK dan yang memiliki Standar Nasional yaitu Nilai Maturitas SPIP dan Nilai Kapabilitas APIP.

Analisis pencapaian kinerja dan permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF/SOLUSI
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Tindak Lanjut dalam RKPD berikutnya
1.	Nilai Maturitas SPIP	- Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Adanya Pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur	- Belum seluruh Perangkat Daerah dan personil mengerti akan pentingnya SPIP dan pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbatasnya SDM.	Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman atas komponen-komponen penilaian SPIP yaitu : 1. Pendampingan entry data ke Aplikasi SPIP Terintegrasi. 2. BinteK dan Pendampingan tentang Manajemen Risiko dan Register Resiko. 3. Pendampingan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK)	1. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan. 2. Koordinasi aktif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penyelesaian penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
2.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerahnya masing-masing.	Kurangnya optimalisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kualitas dokumen AKIP masih berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan.	1. Inspektorat Daerah memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang	Bimbingan Teknis, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian AKIP Perangkat Daerah.

				kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah. 2. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.	
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat. 2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR. 3. Dukungan pimpinan dan komitmen untuk mencapai level yang lebih tinggi dan peningkatan skor. 4. Membentuk Satuan Tugas/Tim Peningkatan Kapabilitas	a. Kompetensi SDM belum memadai b. Kuantitas SDM belum memadai. c. Anggaran belum memadai.	Membuat Nota Dinas kepada Bapak Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memenuhi anggaran Inspektorat Daerah sesuai dengan Permendagri dan memenuhi kebutuhan SDM Inspektorat Daerah sesuai rekomendasi dari BPKP dan MenPANRB dimana Pengadaan CPNS untuk APIP pelaksanaannya pada akhir Tahun 2024 sehingga baru terealisasi pada tahun 2025, begitupun atas anggaran baru terealisasi pada Anggaran Inspektorat Daerah Tahun	1. Meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dengan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP 2. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pengawasan sesuai PPBR

		APIP. 5. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi. 6. Penyusunan PKPT sudah berbasis Resiko		2025	
4.	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Beberapa Aspek Penilaian SAKIP lebih baik dari sebelumnya	1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 2. Laporan Kinerja sudah menyajikan <i>benchmarking</i> Kinerja dan upaya perbaikan kinerja tetapi belum secara terperinci per sasaran/indikator. 3. Adanya mandatory penugasan dari pusat (MCP KPK) sehingga merubah program kerja dan renaksi yang telah ditetapkan.	Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan.	1. Kegiatan perencanaan program kerja pengawasan, penyusunan PK, IKU RKT, Renaksi dan lainnya. 2. Kegiatan Dialog kinerja, Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap tribulan, semesteran dan tahunan sesuai dengan renaksi. 3. Penyusunan Laporan Kinerja PD dan Individu secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan
4. Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2024 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan di luar gaji pegawai, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
4. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi di bidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
5. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor/aparatur fungsional pengawasan pada Pendidikan dan pelatihan teknis dengan durasi 120 jam sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

6. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh instansi dan unit kerja yang ingin membangun ZI, termasuk syarat tingkat instansi dan unit kerja, serta persyaratan minimal WBK/WBBM

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Tersedianya SDM yang berkompeten;
3. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

1. Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan;
2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat Daerah dari Watchdog menjadi penjamin mutu (Quality Assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
2. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
3. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Pembangunan ZI memerlukan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif dan mencapai target yang diharapkan.

5. Meningkatkan dan Mempertahankan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3;
6. Meningkatkan dan Mempertahankan Nilai Kapabilitas APIP Level 3;
7. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bersih dari KKN.

Faktor Peluang :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah;
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur);
4. Sumber daya manusia yang berintegritas.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat **beberapa isu strategis, antara lain :**

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Pergeseran paradigma APIP/ perubahan peran APIP dari yang sebelumnya hanya fokus pada mencari kesalahan (watchdog) menjadi lebih fokus pada pembinaan, pencegahan, konsultasi, dan penjaminan kualitas (quality assurance).
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance untuk mendukung Astacita Presiden nomor 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan..

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review ini dilakukan dengan membandingkan rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra 2025-2029).

Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kondisi yang riil dan menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	<u>100%</u>	31,785,642,767	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	<u>100%</u>	15,187,091,216	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	508,156,900	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	<u>100%</u>	439,378,000	
1.1.1 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokum en	150,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokum en	147,666,000	Menyesuaikan kebutuhan
1.1.2 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lapora n	358,156,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lapora n	291,712,000	Menyesuaikan kebutuhan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabka n	100%	25,115,620,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabka n	100%	11,036,115,996	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	1116 orang-bulan	25,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	1148 orang-bulan	10,968,915,996	Perhitungan dari BPKPD bagian gaji, akan tetapi hanya mengakomodir TPP CPNS sedangkan gaji 46 orang CPNS dan 9 orang P3K belum terakomodir
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	37,200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen	-	THL sudah lulus ujian P3K
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78,420,000	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	67,200,000	menyesuaikan besaran anggaran
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	2,478,370,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	1,462,654,500	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	55,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	Menyesuaikan kebutuhan
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125 Orang	2,043,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87 Orang	1,155,000,000	peningkatan Kapabilitas APIP dan Mandatori MCP KPK 120 JP per Tahun

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	380,170,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93 Orang	307,654,500	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	1,289,844,267	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	730,270,221	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	75,993,597	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	55,567,266	Menyesuaikan kebutuhan
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	454,908,390	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	295,245,925	Menyesuaikan kebutuhan
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	2,178,280	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	45,857,030	Menyesuaikan kebutuhan
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10,800,000	Kenaikan harga
1.4.5	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	656,764,000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	22,800,000	Menyesuaikan kebutuhan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	215,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	116,931,800	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	85,000,000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 paket	9,468,300	kursi pejabat

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	75,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	37,573,500	peralatan server
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	59,890,000	Tempat Parkir
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	55,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000	AC
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	1,012,229,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	779,006,699	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2,595,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8 Laporan	1,600,000	Menyesuaikan kebutuhan
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	756,900,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	758,200,499	Penambahan jumlah Sarana Prasarana dan Jumlah Pegawai
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 Laporan	252,734,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	4 Laporan	19,206,200	Menyesuaikan kebutuhan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	1,166,422,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	622,734,000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	799,122,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	460,180,000	Menyesuaikan kebutuhan
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	167,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52 Unit	112,554,000	Menyesuaikan kebutuhan seiring meningkatnya jumlah Sarana/Prasara na, Jumlah Pegawai dan kegiatan pengawasan
1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	199,800,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Menyesuaikan kebutuhan
2.	PROGRAM PENYELANGG ARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal tuntas/telah selesai (TS)	91%	2,536,797,850	PROGRAM PENYELANGG ARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal tuntas/Telah Selesai (TS)	91%	993,918,280	
2.1	Penyelenggara an Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT	100%	1,924,053,150	Penyelenggara an Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT	100%	723,361,780	Indikator kebutuhan menyesuaikan renstra 2025- 2029
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Lapora n	162,560,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	4 Lapora n	71,826,000	Menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	75,271,600	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	117,252,000	Kegiatan Rakorwas
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	52 Laporan	150,567,650	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	66,370,500	Menyesuaikan kebutuhan
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	106 Laporan	175,448,200	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	66,754,000	Menyesuaikan kebutuhan
2.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Laporan	250,523,200	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	8 Laporan	167,452,000	Menyesuaikan kebutuhan
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	806,925,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	0 Kesepakatan	-	keberadaan satgas saber pungli ditimbang sudah tidak efektif oleh Presiden Prabowo, maka sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Perpres 87 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak 6 Mei 2025 melalui Perpres 49 2025
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	302,757,500	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	233,707,280	Menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	1. Persentase permintaan audit yang telah dilakukan pengawasan	100%	612,744,700	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	1. Persentase Permintaan audit yang telah dilakukan pengawasan	100%	270,556,500	
			2. Persentase Penanganan Pengaduan/Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan	100%				2. Persentase Penanganan Pengaduan/Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan	100%		
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	46,856,450	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Laporan	41,606,500	Menyesuaikan kebutuhan
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	565,888,250	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 Laporan	228,950,000	Penyelesaian Audit Investigasi, Pengaduan Masyarakat, dan Sosialisasi Dumas
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	1, Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai evaluasi AKIP minimal A	56%	1,243,092,500	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	1, Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP Minimal A	56%	568,086,500	
			2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	89.49%				2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	89.49%		
			3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	44.44%				3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	44.44%		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	0%	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	7,206,500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0% Rekomendasi	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	7,206,500	SOP dan Perbup MR
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	1,243,092,500	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	560,880,000	
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 perangkat daerah	672,422,500	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	231,330,000	Kegiatan SPIP, SAKIP, SAKIP RB
3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	395,670,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15 kegiatan	292,950,000	Sosialisasi UPG, SPI, Rakor MCP KPK
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	175,000,000	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	36,600,000	ZI
	JUMLAH				35,565,533,117	JUMLAH				16,749,095,996	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah dikarenakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sasarannya *tidak melibatkan kelompok masyarakat* dan sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab./Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga pengawasan juga melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan aparat pengawas lainnya seperti BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, KPK, BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dan lainnya.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selaku instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini sudah ada 1 Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan berpredikat menuju WBK yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi untuk mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua alat ukur dalam menilai kepatuhan pengelola negara pada pencegahan korupsi. Mereka adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa. Selain MCP, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Pengukuran SPI ini bersifat kelembagaan atau organisasi pada K/L atau pemda, yang bertujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi, perbaikan sistem antikorupsi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi. Capaian MCP KPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebesar 92,35% terdapat peningkatan progres capaian dari Tahun 2023 (89,11%), sedangkan SPI di Tahun 2024 tercapai sebesar 69,34.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam mendukung Visi Bupati Pasuruan yaitu “Kabupaten Pasuruan Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan”, Misi ke 4 yaitu “Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah” dengan Tujuan 4 “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” Sasaran 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa".

Untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku instansi pengawasan, maka Tujuan dan Sasaran pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, yaitu :

Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Tujuan : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas APIP
1. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran: 1.1. Nilai Kapabilitas APIP
2.1. Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3.1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026

NO.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja/SPM/IKK	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
I	Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP (IKK)	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)
II	Sasaran				
1	Meningkatnya Kualitas APIP	1. Nilai Kapabilitas APIP (IKK)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2. Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,54	16,74	16,94
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	84,60 (A)	84,62 (A)	84,64 (A)

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPJMD dan IKU

Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029			IKU		
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator Tujuan	Formulasi	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai AKIP	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	78,16	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP	Level 3 (3.250)
Opini BPK	Laporan Hasil Pengawasan BPK	WTP			

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan nomor 4 RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yaitu ***Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Pemilihan Program dan Kegiatan ini didasarkan pada standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai perannya selaku aparat pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar selalu mentatai hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watchdog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dan kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, professional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

A. Program

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026, yaitu 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Pengadaan Mebel.
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Laporan Kinerja.
 - 4. Reviu Laporan Keuangan.
 - 5. Pengawasan Desa.
 - 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi.

1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas.

C. Lokasi Penyebaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja Tahun 2026, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Inspektorat Daerah khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya serta luar daerah Kabupaten Pasuruan. Dengan kelompok sasaran (Obyek Pemeriksaan) terdiri dari :

Kantor/Dinas/Badan/RSUD : 33

Kecamatan : 24

Desa : 24

Lainnya : 20

(Audit Investigasi dan
Pengaduan Masyarakat)

D. Kebutuhan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Permendagri nomor 2 Tahun 2025 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi diatas 2 Trilyun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 15 Milyar diluar gaji pegawai, sehingga Inspektorat Daerah dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Tujuan Pemerintahan Daerah (Penguatan APIP) serta adanya penambahan pegawai pada tahun 2025 sebanyak 46 orang sehingga total menjadi 93 orang.

Terkait hal tersebut diatas Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 sejumlah Rp. 16.749.095.996,- belum memenuhi kebutuhan, terutama Gaji 46 orang CPNS dan 9 orang PPPK belum terakomodir.

Tabel 3.3.1
PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TERHADAP SIPD

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH
Urusan : URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakh iran; atau - Penonakti fan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Tetap	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				Tetap	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal	%	Tetap	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal	%
			Formula : rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal						Formula : rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	

			2. Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan sesuai Program Kerja	%					2. Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan sesuai Program Kerja	%
			Formula : Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan internal dan PDTT dibagi Perangkat Daerah/Lembaga yang akan dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja						Formula : Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan internal dan PDTT dibagi Perangkat Daerah/Lembaga yang akan dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	%	Tetap	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	%
			Formula : Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan dibagi Perangkat Daerah/Lembaga yang akan dilakukan pengawasan						Formula : Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan dibagi Perangkat Daerah/Lembaga yang akan dilakukan pengawasan	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Tetap	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan

6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Tetap	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Tetap	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Tetap	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Tetap	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Tetap	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Tetap	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase permintaan audit dengan tujuan tertentu 2. Persentase Penanganan Pengaduan/Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan	%	Tetap	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase permintaan audit dengan tujuan tertentu 2. Persentase Penanganan Pengaduan/Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan	%

			Formula : Permintaan audit dengan tujuan tertentu dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilaku kan pemeriksaan dibagi 100%Perminta n audit dengan tujuan tertentu dan Pengaduan Masyarakat yang masuk						Formula : Permintaan audit dengan tujuan tertentu dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan dibagi 100%Permintaan audit dengan tujuan tertentu dan Pengaduan Masyarakat yang masuk	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Tetap	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Tetap	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di wilayah Dengan Nilai A	%	Tetap	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di wilayah Dengan Nilai A	%
			Formula : Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A dibagi Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan						Formula : Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A dibagi Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan	

			2. Nilai Area Intervensi Pengawasan APIP pada MCP KPK	%					2. Nilai Area Intervensi Pengawasan APIP pada MCP KPK	%
			Formula : Hasil Nilai Area Intervensi Pengawasan APIP pada MCP KPK						Formula : Hasil Nilai Area Intervensi Pengawasan APIP pada MCP KPK	
			3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	%					3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	%
			Formula : Jumlah unit kerja/PD yang diusulkan ZI ke TPN dibagi dengan jumlah Jumlah unit kerja/PD yang dicanangkan ZI untuk memperoleh predikat WBK/WBBM						Formula : Jumlah unit kerja/PD yang diusulkan ZI ke TPN dibagi dengan jumlah Jumlah unit kerja/PD yang dicanangkan ZI untuk memperoleh predikat WBK/WBBM	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	%	Tetap	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	%

			Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun dibagi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang diperlukan						Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun dibagi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang diperlukan	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	%	Tetap	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	%	Tetap	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	%
			Formula : Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi dibagi Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan						Formula : Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi dibagi Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Pendampingan, Asistensi, Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	Tetap	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Pendampingan, Asistensi, Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah

6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Tetap	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah	Tetap	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan dan Evaluasi serta dan Pemberantasan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	%	Tetap	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	%	Tetap	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	%
6.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen

6.1.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%	Tetap	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%	Tetap	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%

6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	Tetap	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	Tetap
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen

6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	Tetap	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%	Tetap	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%

6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	%	Tetap	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemutakhiran kode	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
-----------------	--	--	--	------	-------------------	-------------------	--	--	--	------

Berdasarkan tabel pemetaan diatas tidak terdapat perubahan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan.

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah yang mendukung prioritas daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 berikut ini :

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai AKIP	Hilirisasi Potensi Unggulan daerah dan peningkatan produktifitas UMK melalui integrasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan kemandirian pangan dan Pertumbuhan Ekonomi inklusif	PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berbasis digital	Program Prioritas No. 33 : Digitalisasi layanan publik, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	Pengawasan Kinerja	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP
Opini BPK				Pengawasan Keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP
				Pengawasan Desa	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Kapabilitas APIP
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Kapabilitas APIP

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung 33 Program Prioritas

Inspektorat Daerah mendukung proyek strategis berupa Pembangunan Zona Integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan diklat dan audit TIK untuk meningkatkan nilai SPBE. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas dapat dilihat pada tabel 3.3.3 berikut ini :

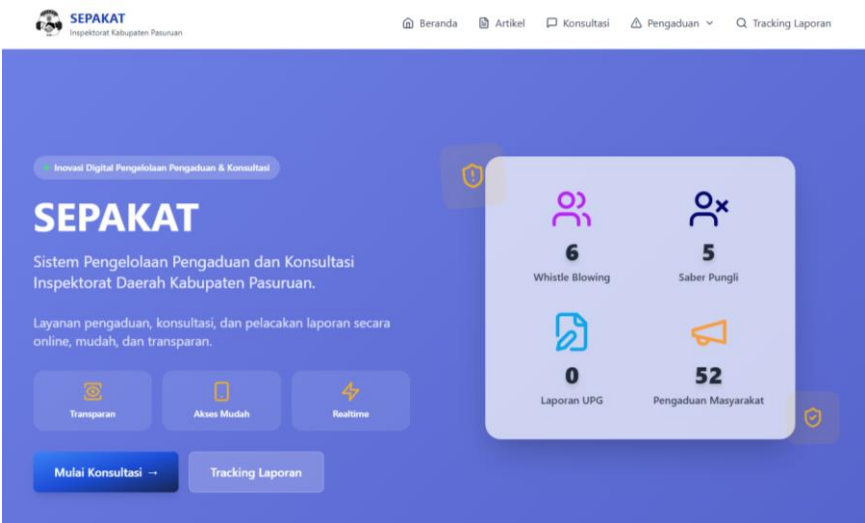
Tabel 3.3.3
Matrik 33 Program Prioritas Bupati pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBH T/ ... disebut kan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Perangkat Daerah / Unit Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
33	Digitalisasi layanan publik, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	Inspektorat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	233,707,280	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	Layanan Pengaduan Masyarakat dan TLHP (Sepakat Berintegritas)
		Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	4 Perangkat Daerah	36,600,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	DPMPTSP, Dispenduk capil, RSUD Bangil, RSUD Grati, UPTD SMPN1 Bangil	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian ZI untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mengoptimalkan peran APIP dalam melaksanakan pembinaan (*consulting*) dan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara efektif dan efisien, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa inovasi yaitu :

- 1. Aplikasi SEPAKAT (<https://sepakat.pasuruankab.go.id>)



SEPAKAT adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, dalam aplikasi ini melayani :

- a. Pengaduan Masyarakat

Laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Whistle Blowing System (WBS)

Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

- c. Saber Pungli

Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah daerah.

d. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

UPG adalah unit yang berada di bawah Inspektorat yang bertugas memproses, memantau, dan mengendalikan gratifikasi. UPG juga merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerima laporan gratifikasi.

Aplikasi ini mulai dipergunakan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang, pada tahun 2025 ini aplikasi tersebut sedang dikembangkan untuk ditambahkan fitur **“Layanan TLHP”** yang akan disosialisasikan dan dipergunakan pada awal tahun 2026. Layanan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah sistem digital yang dirancang untuk mengelola dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta memastikan bahwa temuan pemeriksaan tidak berulang dan potensi kerugian negara dapat dihindari.

2. *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC)

Integrated Coaching Clinic (ICONIC) adalah sebuah program atau kegiatan yang menyediakan konsultasi dan pendampingan, baik secara daring maupun luring, untuk membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan suatu inovasi atau proyek. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovasi dan mengembangkan potensi lokal dengan memberikan penjelasan dan pendampingan teknis antara lain dengan :

- a. Memanfaatkan informasi dari komunitas dan inklusi sosial dalam menggali informasi atas permasalahan;
- b. Meningkatkan sinergitas *Stakeholders* dalam Pemerintahan untuk memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah/atau Pemerintah Desa.
- c. Penguatan implementasi *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC) melalui regulasi, SOP dan Sosialisasi.

Inovasi ini dilaksanakan sejak tahun 2025 yang berupa kegiatan Satu Jam Bersama Desa.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah yang mendukung inovasi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.4 berikut ini :

Tabel 3.5
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah
Tahun 2026

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
Aplikasi SEPAKAT https://sepakat.pasuruankab.go.id	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan	Rp 20,220,000
	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 25,000,000
Integrated Coaching Clinic (ICONIC)	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Rp 23,590,000

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja RPJPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah yang mendukung Indikator Utama Pembangunan yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.3.5
Program Pendukung IUP RPJPD

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/ Tidak	Sub kegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Integritas	Indeks Integritas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi/organisasi telah menerapkan praktik integritas dan pencegahan korupsi	Indeks Integritas = 0,305(Penilaian Internal) + 0,328(Penilaian Eksternal) + 0,367(Penilaian Ahli/Ekspert) - 0,20(0,58(Indeks Prevalensi Korupsi) + 0,42(Indeks Integritas Pelaksanaan SPI))	71,90	perhitungan IUP didukung dari output sub kegiatan			
	Indeks Integritas dihitung dengan menggabungkan penilaian internal, eksternal, dan ahli, dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI	Nilai Indeks Integritas berkisar dari 0 hingga 100		Tidak	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya tujuan RPJMD, prioritas pembangunan/program prioritas, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi diatas 2 Trilyun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 15 Milyar diluar gaji pegawai, sehingga Inspektorat Daerah dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Tujuan Pemerintahan Daerah (Penguatan APIP) serta adanya penambahan pegawai pada tahun 2025 sebanyak 46 orang sehingga total menjadi 93 orang. Terkait hal tersebut diatas Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 sejumlah Rp. 16.749.095.996,- belum memenuhi kebutuhan, terutama Gaji/TPP 46 Orang CPNS dan 9 Orang PPPK.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UNSUR PENGAWASAN										
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Inspekto rat Daerah	100%	15,187,091,216	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	13,668,539,193
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subke giatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	Inspekto rat Daerah	100%	439,378,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	439,378,000
6010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt or at Daerah	7 Dokumen	Belanja : barang 147,666,000 dan jasa			7 Dokumen	147,666,000
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt or at Daerah	5 laporan	Belanja : barang 291,712,000 dan jasa			5 laporan	291,712,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Inspekt rat Daerah	100%	11,036,115,996	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	9,715,219,361
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt or at Daerah	114 orang- 8 bulan	Belanja : Pegawai 10,968,915,996		Tambah an TPP pegawai CPNS 46 orang	114 orang- 8 bulan	9,648,019,361
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspekt or at Daerah	0 dokumen	Belanja : barang dan jasa -			0 dokumen	-
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspekt or at Daerah	12 dokumen	Belanja : barang dan jasa 67,200,000			12 dokumen	67,200,000
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Inspekt or rat Daerah	100%	1,462,654,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1,462,654,500
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Inspekt or at Daerah	0 Paket	Belanja : barang dan jasa -			0 Paket	-
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Inspekt or at Daerah	87 Orang	Belanja : barang dan jasa 1,155,000,000		Menduku ng Asta Cita No.7	87 Orang	1,155,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektora at Daerah	93 Orang	Belanja : barang dan jasa 307,654,500		Mendukung Asta Cita No.7	93 Orang	307,654,500
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	Inspektora rat Daerah	100%	730,270,221	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	641,416,833
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektora at Daerah	3 Paket	Belanja : barang dan jasa 55,567,266			3 Paket	55,567,266
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Inspektora at Daerah	8 Paket	Belanja : barang dan jasa 295,245,925			8 Paket	206,392,537
6010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Inspektora at Daerah	3 Paket	Belanja : barang dan jasa 45,857,030			3 Paket	45,857,030
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Inspektora at Daerah	12 Dokumen	Belanja : barang dan jasa 10,800,000			12 Dokumen	10,800,000
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupate n Pasuruan	80 Laporan	Belanja : barang dan jasa 322,800,000			80 Laporan	322,800,000
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Inspektora rat Daerah	100%	116,931,800	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	20,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010120705	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Inspektora t Daerah	2 unit	Belanja : Modal 9,468,300			2 unit	5,000,000
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Inspektora t Daerah	5 unit	Belanja : Modal 37,573,500			5 unit	5,000,000
6010120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektora t Daerah	1 unit	Belanja : Modal 59,890,000			0 unit	-
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	Inspektora t Daerah	1 unit	Belanja : Modal 10,000,000			1 unit	10,000,000
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang opsersional kantor yang tersedia	Inspektora t Daerah	100%	779,006,699	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	779,006,699
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kabupatena Pasuruan	8 Laporan	Belanja : barang dan jasa 1,600,000			8 Laporan	1,600,000
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	Inspektora t Daerah	12 Laporan	Belanja : barang dan jasa 758,200,499			12 Laporan	758,200,499
6010120805	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Inspektora t Daerah	4 Laporan	Belanja : barang dan jasa 19,206,200			4 Laporan	19,206,200
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	Inspektora t Daerah	100%	622,734,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	610,863,800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Inspektora Daerah	15 Unit	Belanja barang dan jasa : 460,180,000			15 Unit	448,309,800
6010120905	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Inspektora Daerah	52 Unit	Belanja barang dan jasa : 112,554,000			52 Unit	112,554,000
6010120906	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektora Daerah	0 Unit	Belanja barang dan jasa : -			0 Unit	-
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Inspektora Daerah	1 Unit	Belanja barang dan jasa : 50,000,000			1 Unit	50,000,000
60102	PROGRAM PENYELANGGAR AAN PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal tuntas/Telah Selesai (TS)	Kabupaten Pasuruan	91%	993,918,280	Dana Alokasi Umum (DAU)		92%	960,211,000
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal Tepat Waktu Sesuai PKPT	Persentase realisasi penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT	Kabupaten Pasuruan	100%	723,361,780	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	689,654,500
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Kabupaten Pasuruan	4 Laporan	Belanja barang dan jasa : 71,826,000		Mendukung Program Prioritas No. 33	4 Laporan	71,826,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kabupate n Pasuruan	8 Laporan	Belanja Pegawai : 117,252,000		Menduku ng Asta Cita No.7	8 Laporan	117,252,000
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	Kabupate n Pasuruan	57 Laporan	Belanja barang dan jasa : 66,370,500			57 Laporan	66,370,500
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Kabupate n Pasuruan	116 Laporan	Belanja barang dan jasa : 66,754,000			116 Laporan	66,754,000
6010220105	Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	Kabupate n Pasuruan	8 Laporan	Belanja barang dan jasa : 167,452,000		Menduku ng Asta Cita No.7	8 Laporan	167,452,000
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kabupate n Pasuruan	0 Kesepakat an	Belanja barang dan jasa : -			0 Kesepakat an	-
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupate n Pasuruan	4 Dokumen	Belanja barang dan jasa : 233,707,280		Menduku ng Asta Cita No.7	4 Dokumen	200,000,000
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pengawasan atas permintaan/ pengaduan	1. Persentase Permintaan audit yang telah dilakukan pengawasan	Inspekto rat Daerah	100%	: 270,556,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	270,556,500
			2. Persentase Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Masyarakat yang berkadar pengawasan	Inspekto rat Daerah	100%				100%	
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Tertanganinya penyelesaian kerugian negara/ daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	Kabupate n Pasuruan	1 Laporan	Belanja barang dan jasa : 41,606,500		Menduku ng Asta Cita No.7	1 Laporan	41,606,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kabupate n Pasuruan	20 Laporan	Belanja : barang dan jasa228,950,000		Menduku ng Program Prioritas No. 33	20 Laporan	228,950,000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	1, Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP Minimal A	Kabupate n Pasuruan	56%	: 568,086,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		57%	375,090,000
			2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	Inspekt o rat Daerah	89.49%				89.50%	
			3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	Kabupate n Pasuruan	44.44%				44.44%	
60103201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	Kabupate n Pasuruan	100%	7,206,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		0%	-
6010320101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspekt o rat Daerah	1 Rekomend asi	Belanja : barang dan jasa7,206,500			0 Rekomend asi	-
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Unit Kerja/Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	Kabupate n Pasuruan	100%	: 560,880,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	375,090,000
6010320201	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupate n Pasuruan	57 perangkat daerah	Belanja : barang dan jasa231,330,000		Menduku ng PPD 4 dan Asta Cita No.7	57 perangkat daerah	231,330,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6010320202	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupate n Pasuruan	15 kegiatan	Belanja barang dan jasa 292,950,000		Menduku ng PPD 4 dan Asta Cita No.7	15 kegiatan	107,160,000
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	Kabupate n Pasuruan	4 perangkat daerah	Belanja barang dan jasa 36,600,000		Menduku ng PPD dan Asta Cita No.7	4 perangkat daerah	36,600,000
						Total Belanja operasi :				
						Belanja Pegawai : 10,968,915,996				9,648,019,361
						Belanja Barang dan Jasa : 5,780,180,000				5,355,820,832
						Belanja Bunga : -				-
						Belanja Subsidi : -				-
						Belanja Hibah : -				-
						Belanja Bantuan : -				-
						Total Belanja modal : -				-
						Belanja tidak terduga : -				-
						Belanja transfer : -				-
						Total Belanja PD 16,749,095,996				15,003,840,193

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

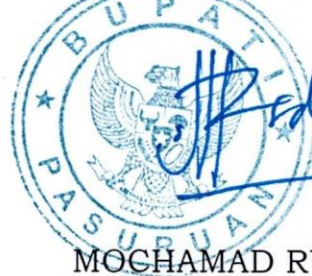
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO